

PERAN PERUM PERHUTANI DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

THE ROLE OF PERHUTANI PUBLIC CORPORATION IN THE COMMUNITY AROUND FOREST

Oktarine Melly Aminah Harum¹⁾, Bainah Sari Dewi^{2) 3)}, Umy Mayasari⁴⁾,
Rafical Cahaya Utama⁵⁾

¹⁾²⁾⁴⁾⁵⁾Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

³⁾Pusat Penelitian dan Pengembangan Biodiversitas Tropika Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng

Bandar Lampung 35141 . tlp : 082177609572

E-mail: oktarinemelly19@gmail.com

Abstrak

Kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya hutan melibatkan dua aktor utama seperti Perhutani dan kelompok-kelompok petani hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran Perum Perhutani dalam pembinaan masyarakat sekitar hutan dan untuk mengeksplorasi kondisi dinamika kelompok-kelompok petani hutan dan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Beberapa variabel dimasukkan dalam penelitian ini seperti potensi individu petani, efektivitas proses pemberdayaan, peran fasilitator, efektivitas pemimpin kelompok petani hutan, dukungan lingkungan. Lokasi penelitian berada di KPH Kedu Selatan, KPH Banyumas Barat dan KPH Banyumas Timur yang dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2018. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di BKPH, serta staf yang ada di BKPH yang terlibat. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, dan menggunakan metode penentuan jumlah sampel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Perhutani memiliki peran penting di dalam pembinaan masyarakat hutan, karena dengan keterlibatan pihak Perum Perhutani dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar hutan dan Tingkat dinamika kelompok petani hutan rendah. Faktor yang mempengaruhi secara signifikan pada rendahnya dinamika kelompok adalah rendahnya efektivitas kepemimpinan kelompok petani hutan, dukungan lingkungan yang tidak menguntungkan dan peran fasilitator yang rendah.

Kata Kunci: Dinamika Kelompok, Warga Desa Hutan, Kelompok Tani Hutan, Hutan Bersama Manajemen, Perhutanan Sosial.

Abstrack

Collaboration in forest resource management involves two main actors such as Perhutani and forest farmer groups. The purpose of this study is: to explore the dynamics of groups of forest farmers and to identify several factors that influence group dynamics. Some variables included in this study such as the potential of individual farmers, the effectiveness of the empowerment process, the role of facilitators, the effectiveness of leaders of forest farmers groups, environmental support. The research location was in KPH Kedu Selatan, KPH Banyumas Barat and KPH Banyumas Timur which was carried out in July to August 2018. The object used in this study was the people who were in BKPH, as well as the staff who were involved in BKPH. Data collection methods are using primary data and secondary data, and using the method of

determining the number of samples. The conclusion of this study is: The level of group dynamics of forest farmers groups is low. Factors that significantly influence the low group dynamics are the low effectiveness of the leadership of forest farmers groups, unfavorable environmental support and the low role of facilitators.

Keywords: *Group Dynamics, Forest Village Residents, Forest Farmers Group, Forest Together Management, Social Forestry.*

Pendahuluan

Peluang masyarakat sekitar hutan untuk turut mengelola sumberdaya alam hutan semakin menguat sejalan dengan adanya pergeseran paradigma pengelolaan hutan. Paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia mengarah kepada pemanfaatan yang mampu memberikan manfaat secara lestari, produktif, efisien dan adil. Pengelolaan sumberdaya hutan bergeser dari sentralistik ke desentralistik, dari berbasis negara menjadi berbasis komunitas. Paradigma baru mengutamakan pengetahuan masyarakat yang kreatif dan dinamis sebagai suatu hasil proses belajar dari kehidupan sehari-hari (Suharjito *et. al.* 2013).

Pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat ini dikenal dengan kehutanan masyarakat (*social forestry*), Abidin (2015) menyatakan bahwa pengelolaan hutan dari sisi fungsi produksinya diarahkan menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Thomposon (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka *social forestry*. Agung (2015) mengemukakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari.

Implikasi pendekatan kehutanan masyarakat adalah bahwa masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Pratama, *et al.* 2016). Masyarakat harus mampu mengendalikan pembuatan keputusan tentang pengelolaan sumberdaya hutan. UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tercantum bahwa pelaku utama

dalam kegiatan kehutanan yaitu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Nadini, 2015). Menurut Sardjono (2014) penguatan modal manusia dalam bidang kehutanan diperlukan agar partisipasi dan kerjasama yang dibangun bersifat setara atau tidak ada dominasi satu pihak kepada pihak lain. Kesetaraan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pembangunan kehutanan dengan pihak lain menjadi sangat penting agar mereka berperan secara optimal dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Hidayat, 2014). Menurut Mulyadi (2016) bahwa aspek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan adalah faktor manusia diantaranya adalah kelembagaan organisasi kelompok tani.

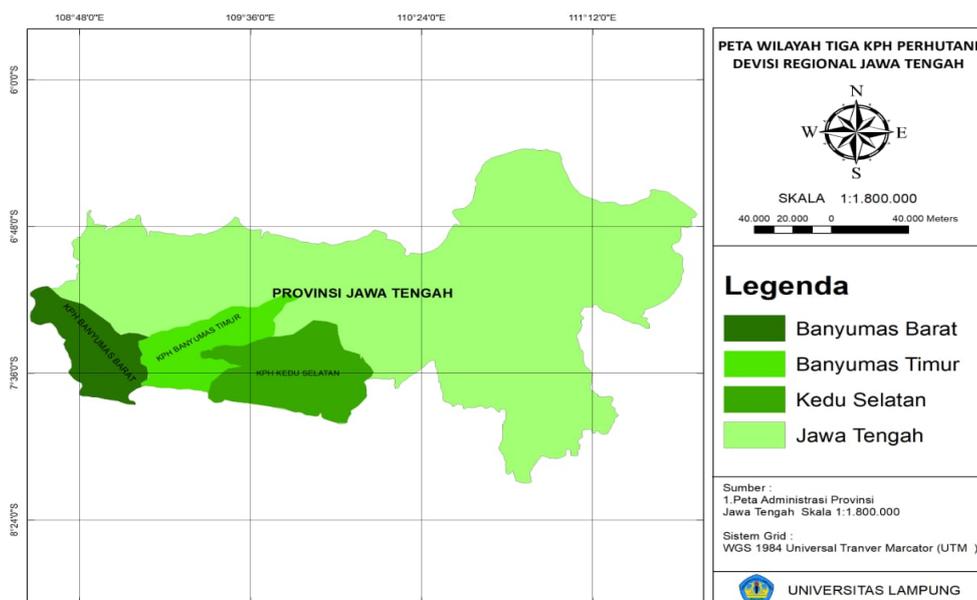
Salah satu bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar hutan yang efektif adalah melalui bentuk pemberdayaan kelompok (Sanjaya, 2017). Pendekatan kelompok mempunyai kelebihan karena lebih luas daya jangkauannya, dan sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan yang lebih komunal. Kurniadi, *et al* (2017) mengemukakan bahwa kelompok juga memiliki fungsi diantaranya sebagai wadah proses pembelajaran dan wahana dalam bekerjasama antar masyarakat. Menurut Thompson (2017) menekankan bahwa salah satu elemen kunci keberhasilan kehutanan masyarakat yaitu pengembangan organisasi (kelompok) lokal untuk mengelola hutan yang partisipatif. Perspektif penyuluhan, Slamet (2017) menyatakan bahwa paradigma baru penyuluhan adalah melalui pendekatan kelompok. Sanudin, *et al.* (2015) Materi penyuluhan yang disajikan melalui kelompok akan lebih efisien dan mempunyai konsekuensi dibentuknya kelompok-kelompok tani sehingga mendorong terjadinya interaksi antar petani dalam wadah kelompok. Interaksi antar petani dalam kelompok sangat penting sebab merupakan forum komunikasi yang demokratis di tingkat akar rumput. Forum kelompok merupakan forum belajar sekaligus forum pengambilan keputusan untuk memperbaiki nasib mereka sendiri (Mulyadi, 2016).

Hakim (2017) menyatakan bahwa melalui pemberdayaan ditumbuhkan yang akan berlanjut pada tumbuh dan berkembangnya kemandirian rakyat tani. Melalui kelompok-kelompok itu kepemimpinan di kalangan petani akan tumbuh dan berkembang melalui pembinaan penyuluh pertanian keberadaan kelompok

tani bagi masyarakat sekitar hutan sudah ada sejak awal-awal program kehutanan masyarakat diluncurkan oleh Perhutani tahun 1980-an (Effendi, 2016). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi dan kedudukan kelompok masih lemah dalam menjalankan perannya mengelola sumberdaya hutan bersama Perhutani. Oleh karena itu aspek kelompok tani hutan sangat penting diperhatikan dalam proses pemberdayaan. Surdjono (2014) mengemukakan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan kelembagaan kelompok tani harus dilakukan secara tepat, agar kelompok dapat menjadi mitra sejajar dengan pihak Perhutani dalam mengelola sumberdaya hutan.

Pentingnya pendekatan kelompok dalam konteks penyuluhan mendorong penulis untuk mendalami permasalahan kelompok tani bagi masyarakat sekitar hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengungkap kondisi potensi sumberdaya individu petani, ketepatan proses pemberdayaan, peran sumber daya manusia pemberdayaan, keefektifan kepemimpinan kelompok, dukungan lingkungan dan dinamika kelompok tani hutan, menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dinamika kelompok tani hutan, dan menyusun model peningkatan dinamika kelompok tani hutan.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Waktu dilaksanakan pada Bulan Juli – Agustus 2018. Penelitian dilaksanakan di KPH Kedu Selatan, KPH Banyumas Barat, KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah. Objek penelitian yang di amati yaitu masyarakat sekitar yang ada di sekitar KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah.

Metode PengumpulanData

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan metode observasi langsung kepada kelompok masyarakat.

Data sekunder merupakan data penunjang penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mencari, menganalisis, mengumpulkan, dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan umum, dan literatur lainnya yang dipakai sebagai bahan referensi. Selain itu, data sekunder juga meliputi keadaan umum lokasi penelitian seperti letak geografis, keadaan fisik lingkungan, sarana dan prasarana di lokasi penelitian.

Metode Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan sampel pada identifikasi dengan mengambil sampel langsung di KPH Kedu Selatan, KPH Banyumas Timur dan KPH Banyumas Barat yaitu masyarakat yang digunakan untuk mengidentifikasi adalah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan produksi di KPH Kedu Selatan, KPH Banyumas Barat dan Banyumas Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Simple Random Sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yg membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Agar data yang diambil berguna maka data tersebut haruslah objektif (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya), representatif (mewakili keadaan yang sebenarnya), variansnya kecil, tepat waktu dan relevan maka diperlukan penggunaan metode penarikan sampel yang tepat agar dari sampel yang diambil dapat diperoleh statistik yang dapat digunakan sebagai penduga (estimator) bagi parameter populasi. Sampel adalah sebagian

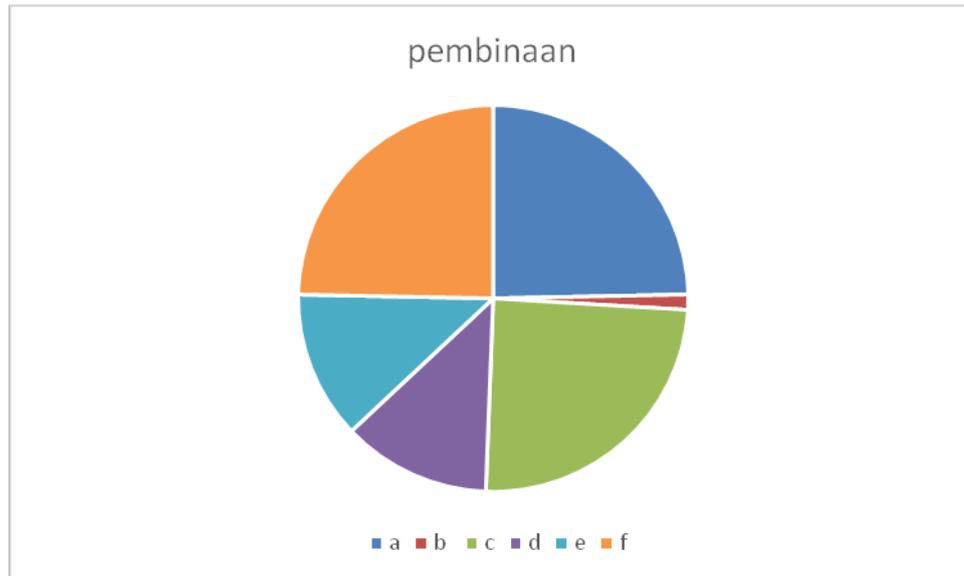
dari anggota populasi yang dipilih sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Nurhayati, 2008).

Hasil Dan Pembahasan



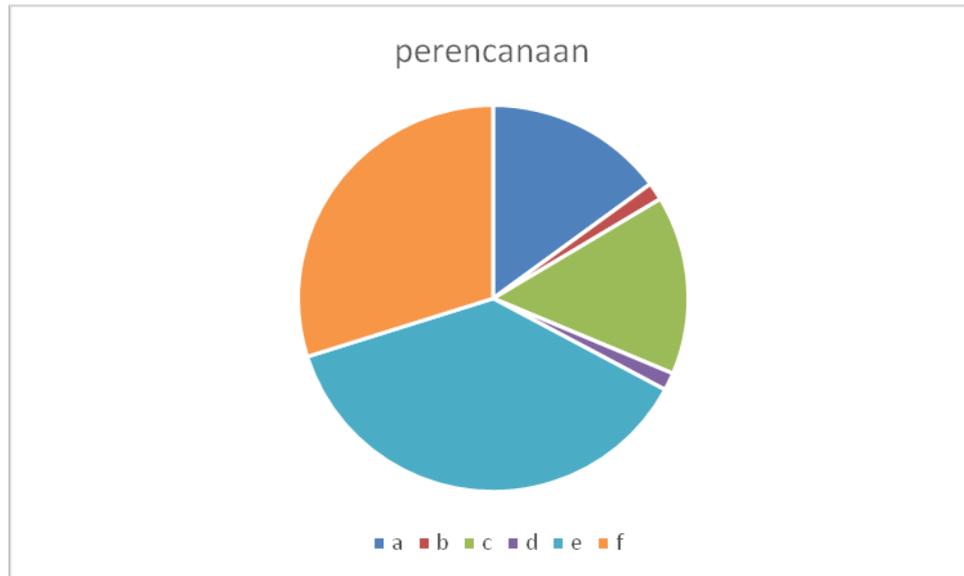
Keterangan :

- a. Pembinaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi vegetasi.
- b. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengetahui satwa yang terdapat di BKPH.
- c. Pembinaan organisasi yang dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat.
- d. Pembinaan yang dilakukan untuk mempelajari dokumen atau arsip terkait dengan kondisi umum KPH atau BKPH.
- e. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengetahui dan mempelajari tahap-tahap pengelola.
- f. Pembinaan keada masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari tahap-tahap pengelolaan hutan.
- g. Pembinaan untuk mengumpulkan informasi mengenai dasar hukum serta kebijakan yang diterapkan.
- h. Pembinaan tentang alur pengiriman kayu.



Keterangan:

- a. Pembinaan tentang penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana.
- b. Pembinaan untuk mengetahui dan mempelajari tahap-tahap pengelolaan hutan.
- c. Pembinaan untuk mengetahui dan mempelajari proses penyusunan dan rencana pengelolaan hutan di KPH.
- d. Pembinaan yang dilakukan untuk memberi tahu bentuk pelibatan masyarakat di lapangan.
- e. Pembinaan yang dilakukan untuk melakukan *social mapping*.
- f. Pembinaan untuk melakukan identifikasi keragaman dan kearifan lokal.



Keterangan:

- a. Perencanaan untuk mengetahui pemanfaatan hasil hutan non kayu.
- b. Perencanaan untuk mengetahui sifat pertumbuhan pohon.
- c. Perencanaan pemasokan hasil hutan bukan kayu.
- d. Perencanaan lembaga pemasaran.
- e. Perencanaan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pembahasan

Perum Perrhutani Devisi Regional 1 Jawa Tengah adalah wilayah pertama yang dikelola saat perhutani pertama kali dibentuk. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Jawa Tengah dan dibagi menjadi 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan). Wilayah yang dilakukan penelitian meliputi 3 KPH, yaitu KPH Kedu Selatan, KPH Banyumas Barat dan KPH Banyumas Timur. Proses penyusunan rencana pengelolaan pada KPH sudah memiliki SOP nya masing-masing. Dari ke 3 KPH yang diteliti masing-masing KPH belum mempunyai perencanaan yang akan dilakukan untuk saluran pemasarannya.

Dari kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi vegetasi 33,3% responden menjawab tidak ada kegiatan yang dilakukan, 33,3% responden menjawab bahwa ada kegiatan yaitu monev dan 33,3% responden menjawab

bahwa ada kegiatan inventarisasi. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengetahui satwa yang terdapat di BKPH adalah 66,6% dilakukan dengan cara sosialisasi dan 33,3% menjawab bahwa tidak mengetahui adakah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi satwa yang di BKPH tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan kepada pengelola KPH diketahui bahwa pembinaan organisasi yang dilakukan oleh BKPH kepada masyarakat yaitu 56,6% menjawab dengan cara sosialisasi, 10% menjawab dengan cara monev dan 33,3% lainnya menjawab dengan cara penyuluhan. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk mempelajari dokumen atau arsip terkait dengan kondisi umum KPH dan BKPH dilakukan dengan cara evaluasi responden yang menjawab dengan cara tersebut sebanyak 20%, 33,3% responden tidak mengetahui cara apakah yang digunakan, 33,3% menjawab dengan cara evaluasi dan 33,3% lainnya menjawab dengan cara laporan. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengerahui dan mempelajari tahap-tahap pengelola yang diterapkan yaitu musyawarah sebanyak 23,2%, pembinaan dan penyuluhan masing-masing menjawab sebanyak 33,3% dan ada 10% responden yang tidak mengetahui pembinaan seperti apa yang dilakukan.

Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola BKPH untuk masyarakat agar mengetahui dan mempelajari proses penyusunan yaitu dengan cara pertemuan perbulan, responden yang menjawab hal tersebut sebanyak 6,6% dan 9,4% nya tidak tau pembinaan seperti apa yang dilakukan. Penyusunan rencana pengelolaan hutan di KPH telah disusun berdasarkan SOP. Pembinaan dari pengelola kepada masyarakat tentang pengumpulan informasi mengenai dasar hukum serta kebijakan yang telah diterapkan di KPH yaitu dengan melakukan penyuluhan 33,3%, 3,3% dengan melakukan agragtria per 3 bulan dan tidak mengetahui sebanyak 63,3%. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola tentang alur pengiriman kayu dilaksanakan dengan cara petemuan perbulan dengan persentase 33,3%, sesuai dengan TPK 23,3% dan tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan sebanyak 43,3%.

Pembinaan dari pengelola kepada masyarakat untuk penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana yaitu dengan cara monev 33,3% dan tidak mengetahui kegiatan yang terjadi sebanyak 66,6%. Perencanaan pengelola untuk mengetahui pemanfaatan hasil hutan non kayu yang akan dihasilkan dengan perencanaan oprasional setiap tahun sebanyak 33,3%, dengan cara pendataan sebanyak 33,3% dan 33,3% lainnya tidak mengetahui. Hasil hutan bukan kayu yang ada di KPH yaitu durian dan mangga sebanyak 16,6%, durian, mangga dan kopi sebanyak 16,6%, jenitri salak dan kopi sebanyak 33,3% dan getah pinus sebanyak 33,3%. Perencanaan yang ada untuk mengetahui sifat pertumbuhan kayu dilaksanakan dengan cara biodev 33,3%, sesuai dengan SOP 3,3% dan tidak mengetahui perencanaan yang ada 63,3%. Pengelolaan yang ada untuk mengetahui dan mempelajari tahap-tahap pengelolaan hutan yang diterapkan yaitu dengan cara sosialisasi 30%, pembinaan dan penyuluhan masing-masing 33,3%, dan yang tidak mengetahui sebanyak 3,3%.

Pembinaan dan perencanaan yang dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari proses penyusunan dan rencana pengelolaan yaitu dengan cara monev sebanyak 33,3% dan yang tidak mengetahui sebanyak 66,6%. Perencanaan pemasokan hasil hutan kayu yang ada dilakukan dengan cara langsung ke TPK sebanyak 33,3%, pengesahan RTT sebanyak 33,% dan penyuluhan sebanyak 33,3%. 100% responden menjawab bahwa belum ada nya perencanaan yang dilakukan untuk saluran pemasaran. Perencanaan lembaga pemasaran dilaksanakan dengan cara penyuluhan yaitu sebanyak 33,3% dan tidak mengetahuinya sebanyak 66,6%. 100% responden menjawab tidak ada pembinaan yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan hutan. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk memberi informasi tentang pelibatan masyarakat di lapangan yaitu dengan pelatihan sebanyak 33,3%, penjelasan kepada masyarakat 33,3% dan 33,3% lainnya menjawab dengan cara penyuluhan. Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk melakukan *social mapping* yaitu dengan cara penyuluhan sebanyak 33,3%, ada sebanyak 33,3% dan tidak mengetahui ada 33,3%.

33,3% dari responden menjawab bahwa tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh pengelola untuk melakukan identifikasi keragaman dan kearifan lokal masyarakat dan 66,6% lainnya menjawab dengan cara penyuluhan. Perencanaan pembuatan peta lokasi praktik umum dilakukan dengan cara pembuatan SOP sebanyak 3,4% dan 96,6% lainnya menjawab tidak ada. Perencanaan yang dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan hasil hutan kayu yang dihasilkan dengan cara perencanaan yaitu 83,4% dan 16,6% menjawab dengan cara pembuatan RTT. 100% hasil hutan kayu yang ada yaitu pinus. 100% responden menjawab bahwa tidak adanya perencanaan didalam proses pemasaran. Proses perencanaan mekanisme dan pelaksanaan PHBM yaitu dengan cara bagi hasil yaitu sebanyak 66,6% responden yang menjawab, dan 33,3% lainnya menjawab tidak mengetahui. Belum adanya perencanaan untuk pembentukan desa model yang dijawab oleh 100% responden.

KESIMPULAN

1. Perhutani memiliki peran penting di dalam pembinaan masyarakat hutan, karena dengan keterlibatan pihak Perum Perhutani dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar hutan.
2. Tingkat dinamika kelompok kelompok petani hutan rendah. Faktor yang mempengaruhi secara signifikan pada rendahnya dinamika kelompok adalah rendahnya efektivitas kepemimpinan kelompok petani hutan, dukungan lingkungan yang tidak menguntungkan dan peran fasilitator yang rendah.

SARAN

Kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi banyak hal yang perlu dibenahi terutama kepada pihak dari Perum Perhutani karena masih banyaknya perbedaan antara SOP (Surat Operasional Prosedur) yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2015. Potensi pengembangan tanaman pangan pada kawasan tanaman rakyat. *Jurnal Litbang*. 34(2): 71-78.
- Agung, M.W dan Biantary, M. 2015. Optimalisasi pendapatan dalam Pengelolaan hutan tanaman di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Elektronik*. 40(2): 152-164.
- Effendi, R. dan Bangsawan, I. 2016. Kajian pola-pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi dalam mencegah *illegal logging*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 4(4): 321-340.
- Hakim, I. 2017. Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: sebuah trobosan dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 6(1): 27-41.
- Hidayat, S. 2014. kondisi vegetasi hutan lindung sesaot, kabupaten lombok barat, nusa tenggara barat, sebagai informasi dasar pengelolaan kawasan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3(2): 97-105.
- Kurniadi, E. Hardjanto. Nugrogo, B. dan Sumardjo. 2015. Kelembagaan kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 10(3): 161-171.
- Mulyadi. 2016. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan). *Jurnal Penelitian*. 34(14): 220-231.
- Sanudin. Awang, Sardono, R dan Purwanto. 2015. Implementasi hutan tanaman rakyat di Kabupaten Pesisir Barat-Lampung dan Kabupaten Tebo-Jambi. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 22(3): 341-349.
- Nadini, R. 2015. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi Hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 10(1): 43-55.
- Sanjaya, R. Wulandari, C. dan Herwanti S. 2017. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2): 30-42.
- Sardjono., dan Mustofa. 2014. Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya. *Jurnal Penelitian*. 11(3): 320-345.
- Slamet, M. 2017. paradigma baru penyuluhan pertanian di era otonomi daerah. *Jurnal Penyuluhan*. 23(01): 123-140.

Suharjito, D., Aziz, K., Wibowo, A., Djatmiko, Martua, T., Sirait., dan Santi, E. 2015. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penyuluhan*. 12(33): 220-225.

Partama, A.R. Yuwono, S.B dan Hilmanto R. 2016. pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok pemilik hutan rakyat di Desa Bandar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 99-112.

Thompson, H. 2014. Social forestry : an analysis of Indonesian forestry policy. *Journal of Contemporary Asia* 29(2):187-201.